

---

# PENGARUH PENERAPAN STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS DISPENDA PROV, DISPENDA KOTA, DAN DISHUB PROV)

Intan Permata Haska Wina ([intanwina07@yahoo.com](mailto:intanwina07@yahoo.com))  
Siti Khairani ([siti.kh@stie-mdp.ac.id](mailto:siti.kh@stie-mdp.ac.id))  
Jurusan Akuntansi  
STIE MDP

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana studi kasus dalam penelitian ini yaitu di Dispenda Kota, Dispenda Prov dan Dishub Prov. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 responden yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, dengan tehnik pengambilan sampel yaitu *nonprobability sampling* dengan tehnik *sampling jenuh*. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan program IBM SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil yang didapatkan dari uji parsial untuk variabel  $x_1$  dengan nilai  $2,326 > 2,037$  dengan signifikansi  $0,027 < 0,05$  dan variabel  $x_2$  dengan nilai  $4,946 > 2,037$  dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ , kemudian hasil dari uji simultan dengan nilai  $29,506 > 3,285$  dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Berarti, jika standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawsan kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan maka akan menghasilkan kinerja akuntabilitas yang baik.

**Kata kunci:** Standar Pelaporan, Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas

## Abstract

*This research aims to know about the influence of public sector accounting standard report and quality control in financial statement where this case study research was placed in Dispenda Prov, Dispenda Kota, and Dishub Prov. The samples in this research there are 35 respondents who have accounting educational background, through sampling techniques are nonprobability sampling with sampling jenuh techniques. The instrument in this research is questionnaire and analyzed by validity, reliability, classical assumption, double linear regression and hypothesis test using IBM SPSS program version 22. This research result shows that variable of the implementation of public sector accounting standard report and quality control in*

---

*financial statement has positive affect and significance both in simultaneous and partial toward performance accountability of government institution. This is shown by the result obtained from the partial test for variable  $x_1$  with the value of  $2,326 > 2,037$  is significantly  $0,027 < 0,05$  and variable  $x_2$  value of  $4,947 > 2,037$  is significantly  $0,000 < 0,05$ . Then the result from the simultaneous test value of  $29,506 > 3,285$  is significantly  $0,000 < 0,05$ . Means, if the public sector accounting standard report and quality control in financial statement can be increased so that it will produce a good performance accountability.*

*Keywords : Standard Report, Quality In Financial Statement, Accountability*

## 1. PENDAHULUAN

Setiap negara menginginkan pemerintahan yang dapat berupaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan *Good Governance*. Salah satu prinsip strategis yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah prinsip tata kelola keuangan. Untuk menciptakan prinsip tata kelola keuangan yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta standar penyajian laporan keuangan yang berlaku.

Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang baik didasarkan pada kinerja akuntabilitas yang menyampaikan serta membuat laporan keuangan tersebut. Berdasarkan peraturan perundangan berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, Pamungkas (2012).

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun pihak eksternal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Perbaikan terhadap kualitas akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan *good governance* dapat diwujudkan oleh pemerintah Indonesia baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Berdasarkan LAKIP Kota Palembang tahun 2013 disimpulkan bahwa ada sebanyak 79 indikator kinerja yang belum tercapai atau yang belum mencapai target yang diharapkan diantaranya di Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Palembang, LAKIP 2013 ([www.palembang.go.id](http://www.palembang.go.id)). Berkaitan dengan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

---

---

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Keagenan

Menurut Sulistyanto (2008, h. 117) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen.

Dari pengertian diatas jika diimplementasikan pada hubungan antara masyarakat dan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan kewenangan dan sumber daya kepada agen, sebagai bentuk pertanggung- jawaban agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal.

### 2.2 Teori Entitas

Kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor (*reporting entity*) yang bertanggungjawab kepada pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban entitas pelaporan sedangkan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawaban.

Nordiawan (2008, h. 34) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan. Dijelaskan pula mengenai entitas pelaporan dalam Undang-undang pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang berbunyi: tiap-tiap kementerian Negara / lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

### 2.3 Konsep dan pengertian Akuntabilitas

Menurut SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertian tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan.

---

## **2.4 Prinsip-prinsip Akuntabilitas**

Dalam pelaksanaannya akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, dan perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus mempunyai suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai bentuk perubahan manajemen instansi pemerintah dalam pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas

## **2.5 Jenis dan Tipe AKIP**

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe, diantaranya menurut Rosjidi (2001, h. 145), tipe dan jenis akuntabilitas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :

### **1. Akuntabilitas Internal**

Setiap pejabat atau pengurus publik baik individu atau kelompok di dalam lingkungan internal pemerintahan yang secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan secara baik mengenai perkembangan kinerja

### **2. Akuntabilitas Eksternal**

Setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk bertanggung jawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya

## **2.6 Tujuan dan Sasaran AKIP**

Dalam Inpres No. 7 1999 disebutkan bahwa tujuan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik. Sedangkan, tujuan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
  2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah
  3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional
  4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
-

## 2.7 Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Maka dibentuklah sebuah standar akuntansi pemerintahan yang kredibel yang dibentuk oleh komite SAP pada tanggal 8 Mei 2008. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparansi serta akuntabilitas, Nordiawan (2008, h. 23)

Ada beberapa hal harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi Bastian (2010, h. 127), antara lain :

1. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi.
2. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajaran
3. Standar memberikan petunjuk tentang data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisien ekonomi serta tujuan sosial lainnya.
4. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

Tujuan laporan akuntansi pemerintah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, politik, dan sosial.

## 2.8 Pengawasan Kualitas Laporan keuangan

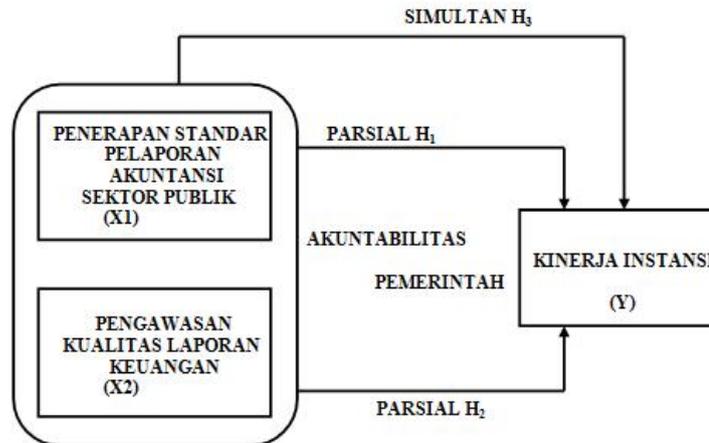
Secara umum, pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. Menurut Nordiawan (2008, h. 35) jenis pengawasan laporan keuangan negara ada 2 meliputi :

1. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dan lingkungan internal organisasi pemerintah.
2. Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik berikut :

1. Relevan
  2. Andal
  3. Dapat dibandingkan
  4. Dapat dipahami
-

## 2.9 Kerangka Pemikiran



**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

Sumber : Data Sekunder Diolah 2014

## 2.10 Hipotesis

$H_{a1}$  : Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

$H_{a2}$  : Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

$H_{a3}$  : Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, dan pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kausal. Pendekatan kausal adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti, Sugiyono (2014, h. 37).

### 3.2 Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/keuangan yang bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

### 3.3 Populasi

Pegawai bagian akuntansi/keuangan yang bekerja di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

### 3.4 Sampel

Sampel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi, artinya seluruh pegawai abagian akuntansi/keuangan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

### 3.5 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *nonprobability sampling*, dengan *Sampling Jenuh* yaitu teknik penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel, Sugiyono (2014, h. 87).

### 3.6 Definisi Operasional

#### 1. Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik (X1)

Suatu tindakan yang dilakukan untuk memastikan standar yang telah ditetapkan telah terealisasi dengan baik dan memastikan semua pihak telah bekerja sesuai standar yang berlaku.

#### 2. Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan (X3)

Segala tindakan yang digunakan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam anggaran.

#### 3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

### 3.7 Jenis Data

#### 3.7.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari melalui hasil kuesioner yang diisi oleh responden mengenai penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### 3.7.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini ialah data yang didapatkan dari 3 Instansi/Dinas yang berupa data para pegawai bagian akuntansi/keuangan sebagai subjek dalam penelitian ini, data jumlah pegawai di dinas tersebut, serta data laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2013.

### 3.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan teknik kuesioner/*survey*. Sedangkan, teknik pengumpulan data secara sekunder ialah dengan metode studi pustaka (*Library research*).

### 3.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi, kemudian dengan uji korelasi, uji hipotesis dengan uji parsial dan uji simultan, dan yang terakhir dengan metode analisis regresi liner berganda, dengan bantuan program IBM SPSS versi 22. Sebelum dilakukan pengukuran data, data ordinal tersebut terlebih dahulu diubah menjadi data interval yang disebut dengan Metode Suksesif Interval (*Method of Successive Interval*).

## 4. PEMBAHASAN

Berikut hasil pengubahan data ordinal menjadi data interval dengan metode suksesif interval (MSI) :

**Tabel 1 Hasil Interval**

<b>Successive Interval (Total Score)</b>		
<b>x1</b>	<b>x2</b>	<b>y</b>
20.712	20.647	37.101
26.444	26.348	37.395
17.927	19.144	20.844
16.632	19.144	28.917
23.610	17.797	25.903
18.064	17.797	25.903
16.632	15.025	17.738
20.367	19.231	26.259
23.694	16.393	23.206
21.078	16.393	23.206
16.347	7.963	17.625
25.148	12.440	23.843
19.868	17.954	28.693
19.228	17.771	27.345
18.367	19.394	25.726
22.389	19.207	28.562
22.317	19.145	30.879
22.389	20.626	24.726
26.444	26.348	36.218
23.684	19.144	25.903
21.396	17.664	28.886
21.245	21.863	26.254
20.702	21.964	26.490
19.146	19.252	24.349
20.907	22.220	28.641
19.657	19.222	27.447
19.721	20.595	27.285
19.330	20.579	28.627
18.679	17.818	28.896
25.151	26.271	35.667

16.503	17.797	25.903
15.008	15.668	21.566
20.760	22.420	31.375
15.761	14.975	11.931
16.430	16.393	21.686

#### 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif**  
Descriptive Statistics

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev	Var
Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik	35	15.008	26.444	20.33534	3.042426	9.256
Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan	35	7.963	26.348	18.93177	3.634187	13.207
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	35	11.931	37.395	26.59986	5.357241	28.700
Valid N (listwise)	35					

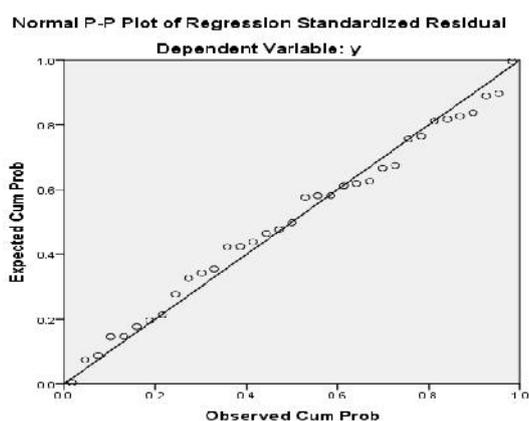
Sumber : Data Diolah Melalui IBM SPSS 22

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel  $X_1$  mempunyai hasil minimum sebesar 15,01; maksimum sebesar 26,44; rata-rata (*mean*) sebesar 20,33; standar deviasi (simpangan baku) sebesar 3,04; dan *variance* sebesar 9,26

Dari variabel  $X_2$  mempunyai hasil minimum sebesar 7,96; maksimum sebesar 26,35; rata-rata (*mean*) sebesar 18,93; standar deviasi (simpangan baku) sebesar 3,63; dan *variance* sebesar 13,21

Dari variabel  $Y$  mempunyai hasil minimum sebesar 11,39; maksimum sebesar 37,39; rata-rata (*mean*) sebesar 26,60; standar deviasi (simpangan baku) sebesar 5,36; dan *variance* sebesar 28,70.

#### 4.2 Uji Normalitas

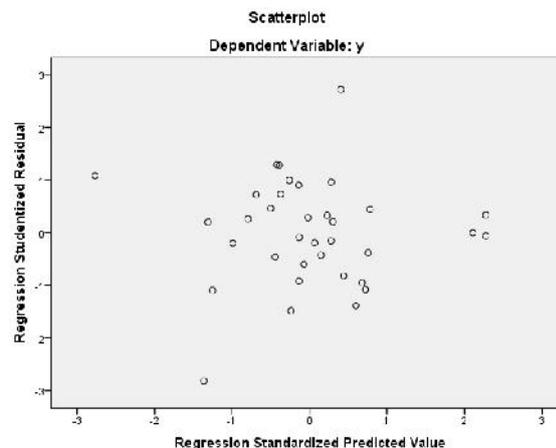


Sumber : Data Diolah Melalui IBM SPSS 22

**Gambar 1 Metode P-plot**

Grafik histogram menunjukkan pola distribusi norma. Grafik Normal *P-P Plot* dari pola yang menunjukkan penyebaran titik-titik disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal mengindikas model regresi yang memenuhi asumsi normalitas, dengan kata lain 35 item dari ketiga variabel memenuhi asumsi normalitas.

### 4.3 Uji Heterokedastisitas



Sumber : Data Diolah Melalui IBM SPSS 22

**Gambar 2 Grafik Scatter Plot**

Berdasarkan hasil dari gambar output diatas dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk suatu pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

### 4.4 Uji Multikolinieritas

**Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolr.	VIF
1 (Constant)	-.844	3.947		-.214	.832		
X <sub>1</sub>	.508	.218	.288	2.326	.027	.714	1.400
X <sub>2</sub>	.904	.183	.613	4.946	.000	.714	1.400

a. Dependent Variable: y

Sumber ; Data Diolah Melalui IBM SPSS 22

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas diatas, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* kedua variabel lebih dari 0,10 yakni 0,714 dan nilai VIF kedua variabel kurang dari 10 yakni 1,400, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas atau variabel independen.

### 4.5 Uji Autokorelasi

**Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R square	Adjs. R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.805 <sup>a</sup>	.648	.626	3.274397	1.917

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data Diolah Melalui IBM SPSS 22

DW	dL	dU	4-dL	4-dU
1,917	1,343	1,584	2,657	2,416

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai dU dan dL yang diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson, dengan  $n = 35$ , dan  $k = 2$ , maka didapatkan nilai  $dL = 1,343$  dan  $dU = 1,584$ . Jadi, nilai  $4-dU = 2,416$  dan nilai  $4-dL = 2,657$ .

Dari output tabel *Model Summary* di atas didapatkan nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,917. Karena nilai DW terletak antara dU dan 4-dU ( $1,584 < 1,917 < 2,657$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

#### 4.6 Koefisien Determinasi

**Tabel 4 Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 <sup>a</sup>	.648	.626	3.274397

a. Predictors: (Constant), Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data Diolah Melalui IBM SPSS 22

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R square ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,648 (64,8%) artinya mendekati 1. Ini berarti bahwa cukup kuat Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan 35,2% ( $100\% - 64,8\%$ ) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berikut beberapa variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini, antara lain :

1. Kejelasan sasaran anggaran, penganggaran berbasis kinerja, dan desentralisasi
2. Penerapan pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
3. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan kinerja
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern

#### 4.7 Uji Parsial

**Tabel 5 Hasil Uji Parsial (Uji T)  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.844	3.947		-.214	.832
X <sub>1</sub>	.508	.218	.288	2.326	.027
X <sub>2</sub>	.904	.183	.613	4.946	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data Diolah Melalui IBM SPSS 22

Berdasarkan hasil dari tabel uji parsial diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel X<sub>1</sub> memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,326 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,027. Sedangkan  $t_{tabel}$  yang dilihat dari tabel signifikansi pada signifikansi  $0,05/2 = 0,025$

dengan derajat kebebasan  $df = n-k-1$  atau  $df = 35-2-1 = 33$ , maka hasil yang diperoleh untuk  $t_{tabel}$  adalah sebesar 2,037. Jadi, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,326 > 2,037$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,027 < 0,05$ ) Maka  $H_0$  ditolak, artinya Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik secara Parsial berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan, variabel  $X_2$  memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4,946 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan  $t_{tabel}$  yang dilihat dari tabel signifikansi pada signifikansi  $0,05/2 = 0,025$  dengan derajat kebebasan  $df = n-k-1$  atau  $df = 35-2-1 = 33$ , maka hasil yang diperoleh untuk  $t_{tabel}$  adalah sebesar 2,037. Jadi, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,946 > 2,037$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ) Maka  $H_0$  ditolak, artinya Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh secara Parsial dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 4.8 Uji Simultan

**Tabel 6 Hasil Uji Simultan (Uji F)**  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	632.707	2	316.354	29.506	.000 <sup>b</sup>
Residual	343.094	32	10.722		
Total	975.801	34			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik

Sumber : Data Diolah Melalui IBM SPSS 22

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa  $f_{hitung}$  adalah sebesar 29,506 dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan  $f_{tabel}$  dengan derajat kebebasan  $df = n-k-1$  atau  $df = 35-2-1 = 33$ , maka hasil yang diperoleh untuk  $f_{tabel}$  adalah sebesar 3,285. Jadi, nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  ( $29,506 > 3,285$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 4.9 Metode Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tol.	VIF
1 (Constant)	-.844	3.947		-.214	.832		
X <sub>1</sub>	.508	.218	.288	2.326	.027	.714	1.400
X <sub>2</sub>	.904	.183	.613	4.946	.000	.714	1.400

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data Diolah Melalui IBM SPSS 22

Dari tabel di atas maka diperoleh persamaan regresi linier berganda, yaitu :

$$Y = -0,844 + 0,508 X_1 + 0,904 X_2 + \varepsilon$$

---

Pada persamaan diatas, dapat diartikan bahwa, Nilai konstanta (a) bernilai negative, yakni -0,844 berarti Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan, nilainya adalah sebesar 0, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah nilainya adalah -0,844.

Nilai koefisien regresi variabel  $X_1$  ( $b_1$ ) bernilai positif, yaitu 0,508 berarti bahwa setiap peningkatan Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik sebesar 1%, maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,508 atau 50,8%. Nilai koefisien regresi variabel  $X_2$  ( $b_2$ ) bernilai positif, yaitu 0,904, berarti bahwa setiap peningkatan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,904 atau 90,4%.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengukuran atau pengujian diatas dapat di tarik kesimpulan sebagai bahwa secara simultan kedua variable memiliki nilai  $f_{hitung} > f_{tabel}$  ( $29,506 > 3,285$ ) dan signifikansi  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengaruh standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semakin baik pula.

Dengan kata lain, apabila kinerja akuntabilitas instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan sesuai standar pelaporan akuntansi sektor publik, lalu dibarengi dengan pengawasan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak eksternal dan pihak internal yang dilakukan secara independensi, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

### 5.2 Saran

#### 1. Bagi Instansi

Diharapkan untuk para pegawai akuntansi atau keuangan yang terlibat langsung dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan tentang Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik yang merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Diharapkan juga bagi pihak yang melakukan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan agar dapat independen dalam melakukan pengawasan agar hasil yang didapatkan adalah hasil yang sesuai kejadian atau fakta yang ada.

#### 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik lagi dengan menambahkan variabel penelitian atau mencoba dengan variabel lain agar penelitian ini dapat lebih berkembang, atau dengan melakukan penelitian ini didaerah lain atau ditingkat dinas yang lebih tinggi.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Andi 2014, *Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Menggunakan SPSS*, Wahana Komputer, Yogyakarta
  - [2] Andi 2014, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*, Duwi Priyatno, Yogyakarta
  - [3] Arikunto, Suharsimi 2010, *Prosedur Penelitian*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta
  - [4] Bastian, Indra 2007, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta
  - [5] Bastian, Indra 2010, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Ketiga, Erlangga, Jakarta
  - [6] Ghozali, Imam 2005, *Ekonometrika: Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
  - [7] Kusumah, AA 2012, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No.2, Hal. 32-33
  - [8] Lasoma, VA 2011, *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Akuntansi, Vol. 3 No. 1, Hal 32-33
  - [9] Nordiawan, Deddy 2007, *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta
  - [10] Nordiawan, Deddy dkk 2008, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta
  - [11] Prasetyo, Bambang dan Jannah LM 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta
  - [12] Puriyatno, Duwi 2014, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*, Andi Offset, Yogyakarta
  - [13] Riahi, Ahmad dan Belkaoui 2006, *Accounting Theor*, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta
-

- [14] Riantiarno, R dan Azlina, N 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 3, Hal. 32-33
- [15] Santosa, Urip 2008, *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jurnal Akuntansi, Vol.
- [16] Subaweh, I dan Nugraheni, P 2008, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi, Vol. 13, No. 1, Hal. 32-33
- [17] Wijaya, Bagus 2014, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013*, Diprint pada Tanggal 14 September 2014, dari [www.palembang.go.id](http://www.palembang.go.id)
-